KULTURA

VOLUME: 12 No. 1 MARET 2011

Isi Majalah Bertanggung Jawab Penulis

Daftar Isi

- Firmansyah
Kms. Muhammad Amin Fauzi
- Bambang Hermanto, SP, M.Si
- Nur Azizah, S.Pd
- Drs. Sumarjo, SH, M.Pd
- Dra. Sempa Peranginangin, M. Hum
- Ir. Ernita, MP
- Zulham Iskandar Muda, S.Pd
- Indra Utama, S.Pd
- Agus Salim, S.Pd
- Najaruddin, S.Pd
- Sutikno
- Sufatmi Suriyanti
- Gabena Indrayani Daimunthe
- Tri Martia
- Lindawati

Kontribusi Metakognisi Di Dalam Mengembangkan Self-Efficacy Matematis Siswa Di Kelas

Analisis Pendapatan Usaha Tani Kelapa Genjah

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bangsa

Peran Guru Dan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Jasmani

Method And Technique Of Teaching Speaking

Peranan Motivasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi

Pembelajaran Keterampilan Gerak Dalam Pendidikan Jasmani

Pengambilan Jumlah Sampel Optimal Dengan Menggunakan Teori Bayasian

Model Pembelajaran Kecerdasan Kinestetik Untuk Pendidikan Dasar

Peranan Bioteknologi Dalam Kehidupan

Keefektifan Strategi Pembacaan, Penceritaan, dan Pengekspresian Cerita (PPPC) Sebagai Upah Penggugah Respon Siswa Terhadap Karya Sastra Di Kelas I SD Pasar Bengkel Tahun Pelajaran 2010/2011

Using Figure Of Speech To Enrich English Descriptive Writing As Foreign Language

Penetapan Kadar Famotidin Dalam Sediaan Tablet Secara Spektrofotometri Ultraviolet

Kelembagaan Penguasaan Lahan Komunal Pada Sistem Agroforestri Di Sumatera Barat

Pengaruh Bahasa Ibu Dan Bahasa Inggris Terhadap Penguasaan Bahasa Indonesia Baku Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al Washliyah

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

DAFTAR ISI

Kontribusi Metakognisi Di Dalam Mengembangkan <i>Self-Efficacy</i> (<i>Firmansyah – Kms. Muhammad Amin Fauzi</i>)	2104
Analisis Pendapatan Usaha Tani Kelapa Genjah (<i>Bambang Hermato, SP, M.Si</i>)	2114
Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Bangsa (<i>Nur Azizah, S.Pd</i>)	2124
Peran Guru Dan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Jasmani (<i>Drs. Sumarjo, SH, M.Pd</i>)	2131
Method And Technique of Teaching Speaking (<i>Dra. Sempa Peranginangin, M.Hum</i>)	2144
Peranan Motivasi Karyawan Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi (<i>Ir. Ernita, MP</i>)	2153
Pembelajaran Keterampilan Gerak Dalam Pendidikan Jasmani (<i>Zulham Iskandar Muda, S.Pd</i>)	2163
Pengambilan Jumlah Sampel Optimal Dengan Menggunakan Teori Bayasian (<i>Indra Utama, S.Pd</i>)	2173
Model Pembelajaran Kecerdasan Kinestetik Untuk Pendidikan Dasar (<i>Agus Salim, S.Pd</i>)	2180
Peranan Bioteknologi Dalam Kehidupan (<i>Najaruddin, S.Pd</i>)	2190
Keefektipan Strategi Pembacaan, Penceritaan, Dan Pengekspresian Cerita (PPPC) Sebagai Upaya Penggugah Respon Siswa Terhadap Karya Sastra Di Kelas I SD Pasar Bengkel Tahun Pelajaran 2010/2011 (<i>Sutikno</i>)	2198
Using Figure Of Speech To Enrich English Descriptive Writing As Foreign Language (<i>Sufatmi Suriyanti</i>)	2213
Penetapan Kadar Famotidin Dalam Sediaan Tablet Secara Spektrofotometri Ultraviolet (<i>Gabena Indrayani Dalimunthe</i>)	2225
Kelembagaan Penguasaan Lahan Komunal Pada Sistem Agroforestri Di Sumatera Utara (<i>Tri Martial</i>)	2240
Pengaruh Bahasa Ibu Dan Bahasa Inggris Terhadap Penguasaan Bahasa Indonesia Baku Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al Washliyah (<i>Lindawati</i>)	2249

KELEMBAGAAN PENGUASAAN LAHAN KOMUNAL PADA SISTEM AGROFORESTRI DI SUMATERA BARAT

Tri Martial¹⁵

Abstract

Agroforestry as a people base forest management commonly not well developed and almost in a traditional management. The most problem in West Sumatera concern to land tenure status as communal property (ulayat land). The need of clearly land tenure mechanism will support this system for sustainable land use. The less security of land tenure do not affect to agroforestry performance, but the management of land use is more important to that effect.

Pendahuluan

Selama ini kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah menjadikan hutan sebagai sumber devisa. Akibatnya ekstraksi hutan lebih mementingkan perusahaan-perusahaan besar pemerintah atau swasta. Sedang pengelolaan tradisional oleh masyarakat hutan terpinggirkan dan masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai agen perusak hutan. Sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pemegang hak pengusahaan hutan.

Konflik pengelolaan hutan terutama bersumber kepada persepsi ketidakadilan oleh masyarakat sekitar hutan dimana akses mereka terhadap sumber daya hutan dan lahan dilarang. Dimana lahan yang diakui sebagai hutan negara sering tumpang tindih dengan lahan masyarakat. Di Sumatera Barat umumnya lahan berkayu (*parak*) merupakan lahan *ulayat* dan tidak bersertifikat. Akibatnya program-program reboisasi hutan dan lahan sering gagal. Oleh sebab itu Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal menjadi kata kunci dalam membangun sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya hutan ini, sebab hal ini memberi rasa aman terhadap dugaan siapa yang mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan.

Agroforestri sebagai salah satu model pemanfaatan lahan lestari, di Sumatera Barat umumnya ditemui pada lahan-lahan masyarakat khususnya pada lahan kering dalam bentuk ladang atau kebun. Agroforestri banyak dipromosikan sebagai sistem *land use* yang tepat untuk mengatasi

¹⁵ Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)
Jl. Karya Bhakti No. 34 Medan, Email: tri_martial@yahoo.com

masalah kerusakan hutan dengan melakukan penanaman pohon pada lahan pertanian, serta mampu meningkatkan pendapatan petani dan akhirnya mengurangi intensitas tekanan pada hutan (Segura-Bonilla, 1997; Unruh, 2001; Place dan Otsuka, 1997; Dias, 2003).

Secara teoritis keberlanjutan agroforestri ini sangat dipengaruhi oleh status hak-hak penguasaan pada lahan, dimana jika diprediksi aman dalam penguasaan lahan dan produk di atasnya, maka investasi ke lahan diharapkan optimal. Oleh sebab itu dalam penelitian ini ingin dikemukakan bagaimana mekanisme kelembagaan penguasaan lahan pada sistem agroforestri ini sehingga mampu mendukung kebijakan pembangunannya.

Areal Studi Dan Metodologi

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Lokasi penelitian adalah areal agroforestri yang merupakan integrasi pohon dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara *purposive*, dengan kategori terdapat pola pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri atau dalam pengertian di Sumatera Barat sebagai *parak* yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang lahan.

Berdasar kategori di atas ditentukan tiga lokasi nagari (desa), yaitu: 1. Nagari Paninggahan, terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 2. Nagari Koto Malintang, terletak di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. 3. Nagari Paru, terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

Obeservasi dilakukan dengan menilai dan menggambarkan pola-pola kelembagaan lahan (*land tenure*) pada lahan komunal dan dinamika yang terjadi pada variabel kelembagaan lahan yaitu kepemilikan, akses atau pemanfaatan, dan manajemen atau kontrol pada lahan. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal social forestry for land and tree tenure*' dalam menentukan *land* dan *tree tenure* (FAO, 2000).

Data primer didapat dari wawancara dan kuesioner dengan petani responden, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu walinagari, ketua-ketua adat, dan ketua organisasi, sedang data sekunder berupa gambaran fisik wilayah setempat dari instansi terkait. Data meliputi keragaan *land tenure*, praktek-praktek penggunaan lahan pada agroforestri, karakteristik sosial ekonomi dan demografi rumah tangga petani, struktur dan peranan organisasi lokal.

Analisis Deskriptif untuk membangun eksplanasi terhadap keragaan dan dinamika penguasaan lahan yang meliputi kepemilikan (*ownerships*), pemanfaatan/akses (*use/access*) dan manajemen/ kontrol (*management/control*).

Hasil Dan Pembahasan

1. Penguasaan Lahan (*land tenure*) di Sumatera Barat

Karakteristik penguasaan lahan di tiga Nagari Paru, Koto Malintang dan Paninggahan pada kategori lahan *ulayat* kaum/suku tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik karakteristik penguasaan tanah (*land tenure*) pada tanah *ulayat* suku/kaum di Paru, Koto Malintang dan Paninggahan

Jenis Hak-hak	Nagari	Dimensi		
		Manusia	Penggunaan	Waktu
		(Siapa)	(Untuk apa)	(Berapa lama)
Pemilikan (<i>ownership</i>)	Paru	▪ Kaum	▪ Agroforestri berbasis karet	▪ Tidak terbatas
	Koto Malintang	▪ Kaum	▪ Agroforestri berbasis pohon multi guna	▪ Tidak terbatas
	Paninggahan	▪ Kaum	▪ Agroforestri berbasis tanaman komersial	▪ Tidak terbatas
Pemanfaatan (<i>use right</i>)	Paru	▪ Anggota kaum (pemegang hak atas tanah)	▪ Agroforestri berbasis karet	▪ Tidak terbatas
	Koto Malintang	▪ Anggota kaum (pemegang hak atas tanah)	▪ Agroforestri berbasis pohon multi guna	▪ Tidak terbatas
	Paninggahan	▪ Anggota kaum (pemegang hak atas tanah)	▪ Agroforestri berbasis tanaman komersial	▪ Tidak terbatas
Mengendalikan (<i>control right</i>)	Paru	▪ Pemegang hak tanah ▪ <i>Mamak</i> rumah	▪ Jenis pemanfaatan, pembatasan dalam pemanfaatan pohon	▪ Selama dalam penggunaan tanah
	Koto Malintang	▪ Pemegang hak atas tanah ▪ <i>Mamak</i> rumah	▪ Jenis pemanfaatan, jumlah tebangan pohon dan pemanfaatannya	▪ Selama dalam penggunaan tanah
	Paninggahan	▪ Pemegang hak atas tanah ▪ <i>Mamak</i> rumah	▪ Pemanfaatan, penebangan pohon	▪ Selama dalam penggunaan tanah
Transfer (<i>transfer</i>)	Paru	▪ Datuk (penghulu)	▪ Diwariskan, diberikan, tetapi tidak dapat dijual	▪ Sepanjang penguasaan kaum
	Koto Malintang	▪ Datuk (penghulu)	▪ Diwariskan, tidak dapat digadai atau dijual	▪ Sepanjang penguasaan kaum

<i>right)</i>	Paning- gahan	▪ Datuk (penghulu) dan Datuk Pucuk	▪ Hanya dapat diwaris- kan, tetapi tidak dapat dijual	▪ Sepanjang penguasaan kaum
---------------	------------------	--	---	--------------------------------

Pada *ulayat* kaum di Nagari Paru, bentuk pemilikan lahan ini dimiliki secara komunal dalam kaum dan suku, merupakan sebagian besar bentuk kepemilikan lahan. Lahan diberikan oleh pimpinan suku/kaum kepada kemenakan untuk dikelola dalam bentuk kebun. Hampir semua pemegang lahan adalah sebagai penggarap. Pemilik/pemegang lahan dan pengelola (penggarap) lahan dapat berbeda suku (komunal)nya, tetapi masih pada nagari Paru.

Sedangkan pemanfaatan lahan pada lahan *ulayat* kaum dilakukan oleh pemilik lahan yang telah mendapat hak pengelolaan dari *mamak* kepala waris. Lahan kebun/ *parak*. Lahan umumnya digunakan sebagai kebun campur berupa agroforestri dengan basis tanaman utama adalah karet. Selain itu juga ditanam berbagai jenis tanaman lain seperti kayu manis, sawit, pinang, meranti, surian dan berbagai jenis tanaman pohon buah seperti mangga, sawo, melinjo, durian, rambutan dan lain sebagainya.

Di Koto Malintang kepemilikan lahan *ulayat* kaum/ suku berada pada kaum/ suku sehingga pemilikan Lahan dimiliki secara komunal dalam kaum/ suku dan lahan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dimana pengelola memperoleh hak pemanfaatan pada lahan setelah diberikan oleh *Mamak*. Lahan tidak dapat dijual atau digadaikan kepada pihak lain kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa.

Kepemilikan lahan warisan juga didapatkan dari garis keturunan pihak ibu (matrilineal), dimana lahan diberikan oleh *mamak* kepada kemenakan biasanya setelah menikah untuk ditanami dengan tanaman multiguna dan tidak boleh dikosongkan. Pemanfaatan sesuai dengan kepentingan pengelola yang telah diberikan hak penguasaannya. Penggunaan lahan umumnya berbentuk parak merupakan campuran tanaman pohon dan tanaman tahunan (*agroforest*).

Kontrol lahan secara umum dilakukan oleh pemegang lahan, dimana ia dengan hak yang dimilikinya selain berupa pemanfaatan lahan juga hak untuk mengeluarkan pengguna lain pada lahan yang dipegangnya. Dengan kata lain walaupun kepemilikan lahan sebenarnya berada pada level kaum, tetapi hak memegang lahan tersebut memberi keleluasaan untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan keinginannya.

Di Paninggahan pada *ulayat* kaum/ suku, kepemilikan lahan berada pada kaum/ suku, sedangkan hak pemanfaatan diberikan kepada anggota kaum/ suku tersebut yang telah ditunjuk

oleh *mamak tungganai*. Kepemilikan lahan diatur melalui ketentuan yang disepakati di dalam KAN. Tanah ulayat suku/ kaum merupakan tanggung jawab seluruh ketua adat (*Datuk*) yang berkoordinasi dengan *Datuk Pucuk* (suku). Pada prinsipnya lahan tidak dapat dipindahtangankan. Tanah hanya dapat diwariskan.

Lahan dapat juga dimanfaatkan oleh orang lain yang bukan anggota kaum/ suku dengan perjanjian bagi hasil. Hak-hak yang didapatkan oleh pemegang lahan adalah dapat menanam dan menanam lagi, menyewakan lahan (umumnya untuk tanaman semusim) walaupun kurang lazim, mewariskannya. Sedangkan lahan tidak dapat dijual kepada pihak lain.

Penggunaan lahan umumnya berbentuk kebun campuran tanaman pohon dan tanaman tahunan (*agroforest*). Penanaman kebun merupakan inisiatif dari luar bekerjasama dengan pemerintahan lokal sebagai proyek penanaman pada lahan kritis. Lahan dapat dipergunakan oleh anggota kaum/ suku yang ditunjuk oleh *mamak tungganai*. Hak-hak pada lahan *ulayat* kaum/ suku ini adalah menanam, menanam lagi, menyewakan (umumnya untuk tanaman semusim), mewariskan, tetapi lahan tidak dapat diberikan kepada pihak lain, digadaikan atau dijual. Kontrol oleh pemegang hak atas lahan, dimana ia berhak mengeluarkan pengguna lain dari lahannya sebagai konsekwensi hak pakai yang telah diberikan.

Kontrol dilakukan oleh masyarakat, secara khusus ada tim pengaman peraturan nagari (Perna), yang terdiri dari: Walinagari/ Kasi Kesra, KAN, Pemuda dan Kepala *Jorong*. Kasus yang terjadi diselesaikan di tingkat nagari, jika tidak diteruskan ke berwajib/ kepolisian. Tim pengaman Perna, ketua ditunjuk, yaitu Kesra, memutuskan masalah dengan jalan musyawarah.

Gambar 1. Hubungan hak-hak perorangan dan komunal pada lahan ulayat kaum

Gambaran dari ke tiga nagari di atas menunjukkan hubungan pemegang lahan dengan lahan di bawah penguasaannya dipengaruhi oleh penguasaan yang diberikan sebagai sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan. Akibatnya hubungan tersebut akan sangat dipengaruhi

oleh tingkat pengelolaan lahan oleh pemegang lahan yang bersangkutan. Hak-hak *private* pada lahan kuat sepanjang lahan dikelola dengan baik atau ditanami dan dipelihara sesuai dengan kepentingannya. Kompleks hubungan ini dapat digambarkan pada Gambar 1.

2. Dinamika Penguasaan Lahan di Sumatera Barat

Jika dilihat dari pola keragaman sistem penguasaan lahan di Sumatera Barat di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem kepemilikan komunal yang berlaku merupakan suatu struktur penguasaan yang bertingkat (hirarki) (Gambar 2).

Ulayat nagari merupakan wadah untuk kepentingan bersama yang lebih diutamakan dibanding dengan *ulayat* kaum atau suku. Untuk tujuan bersama *ulayat* nagari lebih dipentingkan untuk tujuan sosial dalam rangka menjadi lembaga yang mewadahi kepentingan anak nagari yang kekuasaannya di bawah Kerapatan Nagari (KAN). Hal ini tampak dimana menurut Ter Harr (Syahyuti, 2006) *ulayat* suku atau kaum dapat berubah menjadi *ulayat* nagari jika dibutuhkan untuk kepentingan nagari.

Gambar 2. Hirarki struktur penguasaan lahan di Sumatera Barat

Begitu juga dengan *ulayat* kaum dan suku, dimana *ulayat* kaum merupakan hirarki terendah dalam *ulayat* suku yang ditunjukkan oleh kepentingan suku adalah kepentingan bersama yang lebih diutamakan dibanding kepentingan kaum. Namun pengaturan komunal ini tetap mewadahi kepemilikan secara pribadi (*private*), yang ditunjukkan oleh hak-hak penguasaan pada tumbuh-tumbuhan di atasnya yang telah mendapat perlakuan khusus atau berdasarkan karakteristik tanaman tertentu (Michon *et al.*, 1986). Dari hirarki *ulayat* tersebut maka nagari

merupakan lembaga tertinggi dalam struktur adat Minangkabau, sebab pengaturan dalam sistem adat secara keseluruhan berada pada nagari.

Secara teoritis disebutkan bahwa kepemilikan dan keamanan status pohon ditentukan oleh keamanan status pada lahan. Prediksi panen yang panjang pada pohon merupakan hal yang penting untuk menentukan keamanan hak-hak penguasaan pada pohon. Akibatnya pada lahan-lahan *private* dengan status keamanan hak pada lahan yang tinggi akan mendorong investasi ke lahan dalam bentuk penanaman pohon (Bruce, 1988; Otsuka *et al*, 1997). Di Sumatera Barat dimana lahan-lahan umumnya berbentuk komunal maka status keamanan hak-hak pada lahan ini lemah (Otsuka *et al*, 1997). Namun dalam klasifikasi penguasaan lahan ini, hubungan kekuatan ikatan antara pengelola dengan lahan ditentukan oleh tingkat manajemen pada lahan. Artinya ketika lahan dikelola dengan baik dan terus menerus maka hal ini memperkuat penguasaan pada lahan secara perorangan. Ketika lahan ditelantarkan maka kekuatan ikatan atau hak-hak perorangan pada lahan ini melemah dan digantikan oleh penguasaan secara komunal yang dikontrol oleh *penghulu-penghulu* (tetua adat) kaum, suku atau nagari.

Dari sini dapat dikatakan walaupun status keamanan lahan-lahan komunal tetap rendah, tetapi terdapat *parak-parak* yang dikelola dengan baik (Michon *et al*, 1986), mengindikasikan bahwa walaupun status lahan sebagai lahan komunal dengan hak-hak pemilikan yang lemah bukan hambatan bagi keberadaan hak-hak pada pohon. Hal ini juga dapat dilihat dari pendapat Syamsul Bahri (1983), bahwa dalam sistem hukum adat minangkabau ini hak-hak pada lahan berbeda dengan hak-hak terhadap tumbuhan dan bangunan di atasnya. Hak-hak pada pohon menurut Michon *et al* (1986) tergantung pada sifat pohon, pola produksi, orang yang menanam, dan lain-lain.

implikasi kebijakan

Berdasarkan bahasan di atas, hak-hak pada lahan kuat sepanjang lahan dikelola dengan baik atau ditanami dan dipelihara sesuai dengan kepentingannya. Hak-hak pada pohon dalam sistem agroforestri di lahan *ulayat* tetap aman, walaupun kepemilikan lahan komunal mengindikasikan keamanan yang rendah.

Status keamanan lahan yang kuat bukan menjadi standar bagi investasi ke lahan dalam bentuk penanaman pohon dalam menentukan penanaman pohon pada agroforestri di Sumatera Barat. Status keamanan lahan justru ditentukan oleh status pengeloan pada lahan. Semakin tinggi tingkat pengelolaan ini maka hak-hak pada lahan semakin kuat.

Hal ini berimplikasi pada kebijakan penanaman pohon pada lahan masyarakat berbasis komunal. Di Sumatera Barat ini untuk mendorong penanaman pohon yang dibutuhkan bukan penguatan status kepemilikan lahan seperti misalnya sertifikasi lahan, tetapi lebih dipentingkan dukungan dalam pengelolaan lahan dan tanaman di atasnya. Input-input berupa saprodi lebih dibutuhkan dari pada sekedar sertifikasi lahan. Selain itu untuk mendorong penanaman pohon di lahan masyarakat ini perlu kejelasan aturan dan mekanisme pelaksanaan hak-hak menyangkut vegetasi di atasnya, khususnya penguasaan pohon.

Daftar Pustaka

- Bruce, J.W. 1998. Review of Tenure Terminology. Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison. www.wisc.edu
- Dias, H.U. 2003. Analysis of spatial distribution of tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana. *Thesis* in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands
- FAO, 2000. Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure. FAO Corporate Document Repository. www.fao.org
- Hayami, Y dan V.W. Ruttan. 1985. *Agriculture Development: An International Perspective*. The John Hopkins Press, Baltimore and London
- MacDicken dan Vergera. 1990. *The Clasification of Agroforestri*. . In MacDicken dan N.T. Vergera (eds). 1990. *Agroforestry: Classification and Management*. Jhon Wiley and Sons, N.Y
- Michon, G., F. Mary dan J.M. Bompard. 1986. Multistoried agroforestry garden system in West Sumatera, Indonesia. *Agroforestry Systems* Vol 4 : 315-338
- Otsuka, K, S. Suyanto, dan T.P. Tomich. 1997. Does land Tenure Insecurity Discourage Tree Planting? Evolution of Customary Land Tenure and Agroforestry Management in Sumatera. *EPTD Discussion Paper* No. 31. IFPRI, U.S.A. www.ifpri.org
- Place, F., K.Otsuka dan S. Scherr. 2004. Collective action and Property right for sustainable developmment. Property right, Collective action and Agroforestry. Focus 11 Brief 5 of 16 Pebruari 2004. Int.Food Policy Research Institute. www.ifpri.org
- _____, K. Otsuka. 1997. Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda. *EPTD Discussion Paper* No. 24. Int. Food Police Reserch Int. www.ifpri.org

- Segura-Bonilla, O. 1997. Institutional Change and Forestry in Central America. *Paper presented at the DRUID Workshop, Copenhagen, Denmark 8-10 Januari 1997.*
- Syahyuti. 2006. Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 No.1 Juli 2006: 14-17
- Syamsul Bahri. 1983. *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang. Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas, 1982-1983*
- Unruh Jon D. 2001. Viewpoint Poverty and property rights in the developing world: not as simple as we would like. *Land Use Policy* 19 (2002) 275-276